

**PENETAPAN TARIF PREMI
RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI
PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014**

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, termasuk yang menjalankan usaha atau unit usaha berdasarkan prinsip Syariah.
3. Biaya Akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.
4. Komisi adalah komponen Biaya Akuisisi yang menjadi hak Agen Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, bank atau perusahaan pembiayaan sebagai imbalan jasa keperantaraan yang telah diberikan.
5. Agen Asuransi adalah agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
6. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
7. Tarif Premi yang diatur dalam surat edaran ini adalah tarif premi untuk jaminan Asuransi Gempa Bumi yang berlaku untuk 12 bulan.

-2-

II. KETENTUAN RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA

1. DEFINISI

- a. Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini:
 - 1) gempa bumi;
 - 2) letusan gunung berapi;
 - 3) kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi;
 - 4) tsunami.
- b. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) adalah polis yang digunakan dalam menutup risiko khusus Asuransi Gempa Bumi untuk lini Asuransi Harta Benda. Perusahaan asuransi tidak diperkenankan menggunakan polis lain untuk menutup Asuransi Gempa Bumi selain PSAGBI.
- c. Risiko sendiri adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung terlebih dahulu oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.
- d. Nilai Penuh (*Full Value*) adalah harga sebenarnya (*actual value*) atau nilai sehat (*sound value*) suatu obyek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh / memperbaiki obyek yang dipertanggungkan kedalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis
- e. *Loss Limit* adalah batas maksimum ganti rugi yang ditetapkan sebagai harga pertanggungan dimana jika harga pertanggungan tersebut lebih kecil dari Nilai Penuh dan berlaku ketentuan prorata (*average*) pada saat terjadi klaim.

-3-

2. HARGA PERTANGGUNGAN

- a. Perusahaan Asuransi Umum dapat menetapkan harga pertanggungungan baik untuk Kerusakan Fisik maupun Gangguan Usaha berdasarkan :
 - 1) *Full Value Basis*, atau
 - 2) *Loss Limit Basis*.
- b. Jika harga pertanggungungan didasarkan pada *loss limit basis*, Perusahaan Asuransi Umum wajib mendapatkan nilai deklarasi (*declared value*) yang besarnya sama dengan nilai sebenarnya (*actual value*) obyek pertanggungungan bersangkutan, dari tertanggung.
- c. Jika pada saat terjadinya kerugian, nilai deklarasi lebih kecil dari nilai sebenarnya, Perusahaan Asuransi Umum dapat memberlakukan ketentuan pertanggungungan di bawah harga.

3. TARIF PREMI DAN ZONA ASURANSI GEMPA BUMI

- a. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi wajib memberlakukan tarif premi dan Zona Asuransi Gempa Bumi seperti tercantum pada Tabel IV.A.1 dan Table IV.A.2.
- b. Perusahaan Asuransi Umum harus menantumkan Tarif premi Asuransi Gempa Bumi sebagaimana angka 1 diatas dalam Ikhtisar polis atau dokumen yang merupakan bagian dari polis yang wajib diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pembayar premi.
- c. Pihak ketiga yang berhubungan dengan perolehaan bisnis asuransi seperti Agen Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Bank atau Lembaga Pembiayaan dan atau pihak lainnya dilarang menjual tarif premi asuransi yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.

4. KETENTUAN KHUSUS

- a. Perusahaan Asuransi Umum dapat memberlakukan tarif premi Asuransi Gempa Bumi yang memiliki harga pertanggungungan kerugian fisik (*material damage*) lebih besar dari USD300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika) untuk setiap risiko dan setiap lokasi (*any one risk and any one location*) berdasarkan pertimbangan *underwriter* Perusahaan Asuransi Umum.

-4-

- b. Ketentuan Tarif Premi dalam lampiran surat edaran ini tidak berlaku untuk produk asuransi mikro.
- c. Ketentuan yang berlaku untuk lini usaha berdasarkan prinsip Syariah adalah :
 - 1) Polis Asuransi Gempa Bumi;
 - 2) Tarif Premi dan Zona Asuransi Gempa Bumi;
 - 3) Risiko sendiri;
 - 4) Sesi risiko asuransi gempa bumi.

5. KETENTUAN PERALIHAN

Perusahaan Asuransi Umum wajib memberlakukan tarif premi minimum untuk Asuransi Gempa Bumi pada 1 Februari 2014.

TABEL IV.A
TARIF PREMI ASURANSI GEMPA BUMI
PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA

Tarif Premi untuk Kerusakan Fisik dan Gangguan Usaha dengan Harga Pertanggungansan Nilai Penuh (*Full Value Basis*) dengan *Indemnity Period* 12 bulan.

IV.A.1. Commercial and Industrial (Non Dwelling House)

Kelas Konstruksi		Tarif Premi per mil (%)				
		Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V
Steel, Wood and RC Frame	≤ 9 Storeys	0,90	0,95	1,25	1,50	1,90
	> 9 Storeys	1,35	1,45	1,55	1,60	2,00
Others		1,00	1,10	1,55	3,00	4,70

IV.A.2. Dwelling House – occupation code 2976

Kelas Konstruksi		Tarif Premi per mil (%)				
		Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V
Steel, Wood and RC Frame		0,85	0,95	1,15	1,35	1,60
Others		0,90	1,00	1,55	2,75	4,50

Zona mengacu pada tabel IV.D

Aturan Tambahan

1. Untuk gedung bertingkat yang mempunyai bangunan di bawah tanah yang lazim disebut “*basement*” atau “*semi basement*” atau dengan nama apapun, lantai bawah tanah tersebut juga diperhitungkan dalam menentukan jumlah lantai.
Dengan demikian, semua lantai dihitung, baik lantai yang ada di atas tanah maupun yang di bawah tanah.
2. Untuk tower antena yang lazim digunakan sebagai pemancar radio, jaringan listrik, jaringan telepon genggam dan sejenisnya, tingginya tower (dihitung dari permukaan tanah) dianggap sebagai ukuran jumlah lantai, dengan menggunakan dasar perhitungan tinggi 1 (satu) lantai adalah +/- 4 meter.

-6-

**TABEL IV.B
TARIF PREMI UNTUK POLIS LOSS LIMIT**

Penetapan tarif premi untuk polis yang tidak menerapkan pertanggungan secara *full value* maka berlaku skala sebagai berikut :

% of Values	% of Total Premium	% of Values	% of Total Premium	% of Values	% of Total Premium	% of Values	% of Total Premium
100,00	100,00	66,00	88,20	32,00	79,37	4,40	47,00
99,00	99,60	65,00	88,00	31,00	78,75	4,30	46,50
98,00	99,20	64,00	87,80	30,00	78,12	4,20	46,00
97,00	98,80	63,00	87,60	29,00	77,50	4,10	45,50
96,00	98,40	62,00	87,40	28,00	76,87	4,00	45,00
95,00	98,00	61,00	87,20	27,00	76,25	3,90	44,50
94,00	97,60	60,00	87,00	26,00	75,62	3,80	44,00
93,00	97,20	59,00	86,80	25,00	75,00	3,70	43,50
92,00	96,80	58,00	86,60	24,00	74,00	3,60	43,00
91,00	96,40	57,00	86,40	23,00	73,00	3,50	42,50
90,00	96,00	56,00	86,20	22,00	72,00	3,40	42,00
89,00	95,60	55,00	86,00	21,00	71,00	3,30	41,50
88,00	95,20	54,00	85,80	20,00	70,00	3,20	41,00
87,00	94,80	53,00	85,60	19,00	69,00	3,10	40,50
86,00	94,40	52,00	85,40	18,00	68,00	3,00	40,00
85,00	94,00	51,00	85,20	17,00	67,00	2,90	39,75
84,00	93,60	50,00	85,00	16,00	66,00	2,80	39,50
83,00	93,20	49,00	84,70	15,00	65,00	2,70	39,25
82,00	92,80	48,00	84,46	14,00	64,00	2,60	39,00
81,00	92,40	47,00	84,21	13,00	63,00	2,50	38,75
80,00	92,00	46,00	83,90	12,00	62,00	2,40	38,50
79,00	91,60	45,00	83,60	11,00	61,00	2,30	38,25
78,00	91,20	44,00	83,30	10,00	60,00	2,20	38,00
77,00	90,80	43,00	83,00	9,00	58,00	2,10	37,75
76,00	90,40	42,00	82,80	8,00	56,00	2,00	37,50
75,00	90,00	41,00	82,53	7,50	55,00	1,90	37,00
74,00	89,80	40,00	82,20	7,00	54,00	1,80	36,50
73,00	89,60	39,00	81,87	6,00	52,00	1,70	36,00
72,00	89,40	38,00	81,54	5,00	50,00	1,60	35,50
71,00	89,20	37,00	81,21	4,90	49,50	1,50	35,00
70,00	89,00	36,00	80,88	4,80	49,00	1,40	34,50
69,00	88,80	35,00	80,55	4,70	48,50	1,30	34,00
68,00	88,60	34,00	80,22	4,60	48,00	1,20	33,50
67,00	88,40	33,00	80,00	4,50	47,50	1,10	33,00
						1,00	32,50

-7-

TABEL IV.C
SKALA TARIF PREMI GANGGUAN USAHA (*BUSINESS INTERRUPTION*)

Penetapan tarif premi untuk jaminan gangguan usaha (*Business Interruption*) berlaku skala sebagai berikut:

<i>Indemnity Period</i>	Prosentase (%) dari Tarif Premi
1 bulan	20% x 100% tarif premi
2 bulan	30% x 100% tarif premi
3 bulan	40% x 100% tarif premi
4 bulan	50% x 100% tarif premi
6 bulan	60% x 100% tarif premi
9 bulan	80% x 100% tarif premi
12 bulan	100% x 100% tarif premi
15 bulan	96% x 100% tarif premi
18 bulan	93% x 100% tarif premi
21 bulan	91.5% x 100% tarif premi
24 bulan	90% x 100% tarif premi
30 bulan	87% x 100% tarif premi
36 bulan	85% x 100% tarif premi
48 bulan	83% x 100% tarif premi
Untuk <i>Indemnity Period</i> lebih dari 48 bulan penetapan prosentase dari tarif premi diserahkan kepada <i>underwriter</i> Perusahaan Asuransi Umum	

-8-

TABEL IV.D
ZONA ASURANSI GEMPA BUMI

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
1	BALI	KAB. BADUNG	4
2	BALI	KAB. BANGLI	4
3	BALI	KAB. BULELENG	4
4	BALI	KAB. GIANYAR	4
5	BALI	KAB. JEMBRANA	4
6	BALI	KAB. KLUNGKUNG	4
7	BALI	KAB. TABANAN	4
8	BALI	KOTA DENPASAR	4
9	BALI	KAB. KARANGASEM	5
10	BANTEN	KAB. LEBAK	4
11	BANTEN	KAB. SERANG	4
12	BANTEN	KAB. TANGERANG	4
13	BANTEN	KOTA CILEGON	4
14	BANTEN	KOTA SERANG	4
15	BANTEN	KOTA TANGERANG	4
16	BANTEN	KAB. PANDEGLANG	5
17	BENGKULU	KAB. BENGKULU SELATAN	5
18	BENGKULU	KAB. BENGKULU UTARA	5
19	BENGKULU	KAB. KAUR	5
20	BENGKULU	KAB. KEPAHANG	5
21	BENGKULU	KAB. LEBONG	5
22	BENGKULU	KAB. MUKOMUKO	5
23	BENGKULU	KAB. REJANG LEBONG	5
24	BENGKULU	KAB. SELUMA	5
25	BENGKULU	KOTA BENGKULU	5
26	D.I. YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	4
27	D.I. YOGYAKARTA	KAB. GUNUNG KIDUL	4
28	D.I. YOGYAKARTA	KAB. KULON PROGO	4
29	D.I. YOGYAKARTA	KAB. SLEMAN	4
30	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	4
31	DKI JAKARTA	KAB. KEPULAUAN SERIBU	3
32	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	4
33	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	4
34	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	4
35	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	4
36	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	4
37	GORONTALO	KAB. BOALEMO	5
38	GORONTALO	KAB. BONE BOLANGO	5

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
39	GORONTALO	KAB. GORONTALO	5
40	GORONTALO	KAB. GORONTALO UTARA	5
41	GORONTALO	KAB. POHUWATO	5
42	GORONTALO	KOTA GORONTALO	5
43	JAMBI	KAB. BATANGHARI	2
44	JAMBI	KAB. MUARO JAMBI	2
45	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	2
46	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	2
47	JAMBI	KOTA JAMBI	2
48	JAMBI	KAB. BUNGO	3
49	JAMBI	KAB. SAROLANGUN	3
50	JAMBI	KAB. TEBO	3
51	JAMBI	KAB. MERANGIN	4
52	JAMBI	KAB. KERINCI	5
53	JAWA BARAT	KAB. CIREBON	3
54	JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU	3
55	JAWA BARAT	KAB. SUMEDANG	3
56	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	3
57	JAWA BARAT	KAB. BANDUNG	4
58	JAWA BARAT	KAB. BANDUNG BARAT	4
59	JAWA BARAT	KAB. BEKASI	4
60	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	4
61	JAWA BARAT	KAB. CIAMIS	4
62	JAWA BARAT	KAB. CIANJUR	4
63	JAWA BARAT	KAB. GARUT	4
64	JAWA BARAT	KAB. KARAWANG	4
65	JAWA BARAT	KAB. KUNINGAN	4
66	JAWA BARAT	KAB. MAJALENGKA	4
67	JAWA BARAT	KAB. PURWAKARTA	4
68	JAWA BARAT	KAB. SUBANG	4
69	JAWA BARAT	KAB. SUKABUMI	4
70	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA	4
71	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	4
72	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	4
73	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	4
74	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	4
75	JAWA BARAT	KOTA CIMAH	4
76	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	4
77	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	4
78	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	4
79	JAWA TENGAH	KAB. BANYUMAS	3

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
80	JAWA TENGAH	KAB. BATANG	3
81	JAWA TENGAH	KAB. BLORA	3
82	JAWA TENGAH	KAB. BOYOLALI	3
83	JAWA TENGAH	KAB. BREBES	3
84	JAWA TENGAH	KAB. DEMAK	3
85	JAWA TENGAH	KAB. GROBOGAN	3
86	JAWA TENGAH	KAB. JEPARA	3
87	JAWA TENGAH	KAB. KARANGANYAR	3
88	JAWA TENGAH	KAB. KENDAL	3
89	JAWA TENGAH	KAB. KUDUS	3
90	JAWA TENGAH	KAB. PATI	3
91	JAWA TENGAH	KAB. PEKALONGAN	3
92	JAWA TENGAH	KAB. PEMALANG	3
93	JAWA TENGAH	KAB. PURBALINGGA	3
94	JAWA TENGAH	KAB. REMBANG	3
95	JAWA TENGAH	KAB. SEMARANG	3
96	JAWA TENGAH	KAB. SRAGEN	3
97	JAWA TENGAH	KAB. TEMANGGUNG	3
98	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	3
99	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	3
100	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	3
101	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	3
102	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	3
103	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	3
104	JAWA TENGAH	KAB. BANJARNEGARA	4
105	JAWA TENGAH	KAB. CILACAP	4
106	JAWA TENGAH	KAB. KEBUMEN	4
107	JAWA TENGAH	KAB. KLATEN	4
108	JAWA TENGAH	KAB. MAGELANG	4
109	JAWA TENGAH	KAB. PURWOREJO	4
110	JAWA TENGAH	KAB. SUKOHARJO	4
111	JAWA TENGAH	KAB. TEGAL	4
112	JAWA TENGAH	KAB. WONOGIRI	4
113	JAWA TENGAH	KAB. WONOSOBO	4
114	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	3
115	JAWA TIMUR	KAB. BOJONEGORO	3
116	JAWA TIMUR	KAB. BONDOWOSO	3
117	JAWA TIMUR	KAB. GRESIK	3
118	JAWA TIMUR	KAB. JEMBER	3
119	JAWA TIMUR	KAB. JOMBANG	3
120	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	3

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
121	JAWA TIMUR	KAB. MADIUN	3
122	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	3
123	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	3
124	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	3
125	JAWA TIMUR	KAB. NGAWI	3
126	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN	3
127	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN	3
128	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	3
129	JAWA TIMUR	KAB. SAMPANG	3
130	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO	3
131	JAWA TIMUR	KAB. SITUBONDO	3
132	JAWA TIMUR	KAB. SUMENEP	3
133	JAWA TIMUR	KAB. TUBAN	3
134	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	3
135	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	3
136	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	3
137	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	3
138	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	3
139	JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI	4
140	JAWA TIMUR	KAB. BLITAR	4
141	JAWA TIMUR	KAB. KEDIRI	4
142	JAWA TIMUR	KAB. LUMAJANG	4
143	JAWA TIMUR	KAB. MALANG	4
144	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	4
145	JAWA TIMUR	KAB. PONOROGO	4
146	JAWA TIMUR	KAB. TRENGGALEK	4
147	JAWA TIMUR	KAB. TULUNGAGUNG	4
148	JAWA TIMUR	KOTA BATU	4
149	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	4
150	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	4
151	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	4
152	KALIMANTAN BARAT	KAB. BENGKAYANG	1
153	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAPUAS HULU	1
154	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAYONG UTARA	1
155	KALIMANTAN BARAT	KAB. KETAPANG	1
156	KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA	1
157	KALIMANTAN BARAT	KAB. LANDAK	1
158	KALIMANTAN BARAT	KAB. MELAWI	1
159	KALIMANTAN BARAT	KAB. PONTIANAK	1
160	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	1
161	KALIMANTAN BARAT	KAB. SANGGAU	1

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
162	KALIMANTAN BARAT	KAB. SEKADAU	1
163	KALIMANTAN BARAT	KAB. SINTANG	1
164	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	1
165	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	1
166	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BALANGAN	1
167	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BANJAR	1
168	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BARITO KUALA	1
169	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	1
170	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	1
171	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI UTARA	1
172	KALIMANTAN SELATAN	KAB. KOTABARU	1
173	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TABALONG	1
174	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH BUMBU	1
175	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH LAUT	1
176	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TAPIN	1
177	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	1
178	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	1
179	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO SELATAN	1
180	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO TIMUR	1
181	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO UTARA	1
182	KALIMANTAN TENGAH	KAB. GUNUNG MAS	1
183	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS	1
184	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KATINGAN	1
185	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	1
186	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	1
187	KALIMANTAN TENGAH	KAB. LAMANDAU	1
188	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	1
189	KALIMANTAN TENGAH	KAB. PULANG PISAU	1
190	KALIMANTAN TENGAH	KAB. SERUYAN	1
191	KALIMANTAN TENGAH	KAB. SUKAMARA	1
192	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKARAYA	1
193	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI BARAT	1
194	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	1
195	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PASIR	1
196	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PENAJAM PASER UTARA	1
197	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	1
198	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	1
199	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI TIMUR	2
200	KALIMANTAN TIMUR	KAB. MALINAU	2
201	KALIMANTAN TIMUR	KAB. NUNUKAN	2
202	KALIMANTAN TIMUR	KAB. TANA TIDUNG	2

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
203	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	2
204	KALIMANTAN TIMUR	KOTA TARAKAN	2
205	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BERAU	3
206	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BULUNGAN	3
207	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA	1
208	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA BARAT	1
209	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA TENGAH	1
210	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BELITUNG	1
211	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BELITUNG TIMUR	1
212	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	1
213	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA SELATAN	2
214	KEPULAUAN RIAU	KAB. BINTAN	1
215	KEPULAUAN RIAU	KAB. KARIMUN	1
216	KEPULAUAN RIAU	KAB. LINGGA	1
217	KEPULAUAN RIAU	KAB. NATUNA	1
218	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	1
219	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	1
220	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TENGAH	3
221	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	3
222	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG UTARA	3
223	LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG	3
224	LAMPUNG	KAB. WAY KANAN	3
225	LAMPUNG	KOTA METRO	3
226	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	4
227	LAMPUNG	KAB. PESAWARAN	4
228	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	4
229	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	5
230	LAMPUNG	KAB. TANGGAMUS	5
231	MALUKU	KAB. MALUKU TENGAH	4
232	MALUKU	KAB. MALUKU TENGGARA	4
233	MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN BARAT	4
234	MALUKU	KOTA TUAL	4
235	MALUKU	KAB. BURU	5
236	MALUKU	KAB. KEPULAUAN ARU	5
237	MALUKU	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	5
238	MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	5
239	MALUKU	KOTA AMBON	5
240	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA TENGAH	4
241	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA TIMUR	4
242	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA BARAT	5
243	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA SELATAN	5

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
244	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA UTARA	5
245	MALUKU UTARA	KAB. KEPULAUAN SULA	5
246	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	5
247	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE	5
248	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH UTARA	3
249	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA LHOKSEUMAWE	3
250	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH TAMIANG	4
251	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH TENGAH	4
252	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH TIMUR	4
253	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. BENER MERIAH	4
254	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. BIREUEN	4
255	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA LANGSA	4
256	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH BARAT	5
257	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH BARAT DAYA	5
258	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH BESAR	5
259	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH JAYA	5
260	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH SELATAN	5
261	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH SINGKIL	5
262	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH TENGGARA	5
263	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. GAYO LUES	5
264	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. NAGANRAYA	5
265	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. PIDIE	5
266	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. PIDIE JAYA	5
267	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. SIMEULUE	5
268	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA BANDA ACEH	5
269	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA SABANG	5
270	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA SUBULUSSALAM	5
271	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. BIMA	4
272	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK TENGAH	4
273	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK TIMUR	4
274	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA	4
275	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA BARAT	4
276	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	4
277	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. DOMPU	5
278	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	5
279	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	5
280	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. ENDE	4
281	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. FLORES TIMUR	4
282	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. KUPANG	4
283	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. MANGGARAI	4
284	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. MANGGARAI BARAT	4

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
285	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. MANGGARAI TIMUR	4
286	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. NGADA	4
287	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. ROTE NDAO	4
288	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SIKKA	4
289	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA TIMUR	4
290	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	4
291	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. ALOR	5
292	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. BELU	5
293	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. LEMBATA	5
294	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. NAGEKEO	5
295	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA BARAT	5
296	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA BARAT DAYA	5
297	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA TENGAH	5
298	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	5
299	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	5
300	PAPUA	KAB. MERAUKE	1
301	PAPUA	KAB. ASMAT	2
302	PAPUA	KAB. BOVEN DIGOEL	2
303	PAPUA	KAB. MAPPI	2
304	PAPUA	KAB. MIMIKA	3
305	PAPUA	KAB. PUNCAK JAYA	3
306	PAPUA	KAB. BIAK NUMFOR	4
307	PAPUA	KAB. PANIAE	4
308	PAPUA	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	4
309	PAPUA	KAB. SUPIORI	4
310	PAPUA	KAB. WAROPEN	4
311	PAPUA	KAB. YAPEN WAROPEN	4
312	PAPUA	KAB. JAYAPURA	5
313	PAPUA	KAB. JAYAWIJAYA	5
314	PAPUA	KAB. KEEROM	5
315	PAPUA	KAB. NABIRE	5
316	PAPUA	KAB. SARMI	5
317	PAPUA	KAB. TOLIKARA	5
318	PAPUA	KAB. YAHUKIMO	5
319	PAPUA	KOTA JAYAPURA	5
320	PAPUA BARAT	KAB. FAK-FAK	3
321	PAPUA BARAT	KAB. KAIMANA	3
322	PAPUA BARAT	KAB. SORONG SELATAN	3
323	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	3
324	PAPUA BARAT	KAB. RAJA AMPAT	4
325	PAPUA BARAT	KAB. SORONG	4

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
326	PAPUA BARAT	KAB. TELUK BINTUNI	4
327	PAPUA BARAT	KAB. TELUK WANDOMA	4
328	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI	5
329	RIAU	KAB. BENGKALIS	2
330	RIAU	KAB. INDRAGIRI HILIR	2
331	RIAU	KAB. INDRAGIRI HULU	2
332	RIAU	KAB. PELALAWAN	2
333	RIAU	KAB. ROKAN HILIR	2
334	RIAU	KAB. SIAK	2
335	RIAU	KOTA DUMAI	2
336	RIAU	KAB. KAMPAR	3
337	RIAU	KAB. KUANTAN SINGINGI	3
338	RIAU	KAB. ROKAN HULU	3
339	RIAU	KOTA PEKANBARU	3
340	SELAWESI SELATAN	KAB. BARRU	3
341	SELAWESI SELATAN	KAB. ENREKANG	3
342	SELAWESI SELATAN	KAB. LUWU	3
343	SELAWESI SELATAN	KAB. LUWU TIMUR	3
344	SELAWESI SELATAN	KAB. LUWU UTARA	3
345	SELAWESI SELATAN	KAB. PINRANG	3
346	SELAWESI SELATAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG	3
347	SELAWESI SELATAN	KAB. SOPPENG	3
348	SELAWESI SELATAN	KAB. WAJO	3
349	SELAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	3
350	SELAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	3
351	SULAWESI BARAT	KAB. MAMUJU UTARA	3
352	SULAWESI BARAT	KAB. MAJENE	4
353	SULAWESI BARAT	KAB. MAMASA	4
354	SULAWESI BARAT	KAB. MAMUJU	4
355	SULAWESI BARAT	KAB. POLEWALI MANDAR	4
356	SULAWESI SELATAN	KAB. BANTAENG	2
357	SULAWESI SELATAN	KAB. BONE	2
358	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	2
359	SULAWESI SELATAN	KAB. GOWA	2
360	SULAWESI SELATAN	KAB. JENEPONTO	2
361	SULAWESI SELATAN	KAB. MAROS	2
362	SULAWESI SELATAN	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	2
363	SULAWESI SELATAN	KAB. SELAYAR	2
364	SULAWESI SELATAN	KAB. SINJAI	2
365	SULAWESI SELATAN	KAB. TAKALAR	2
366	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	2

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
367	SULAWESI SELATAN	KAB. TANAH TORAJA	4
368	SULAWESI TENGAH	KAB. MOROWALI	3
369	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	4
370	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	4
371	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	4
372	SULAWESI TENGAH	KAB. TOJO UNA-UNA	4
373	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	4
374	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI	5
375	SULAWESI TENGAH	KAB. BUOL	5
376	SULAWESI TENGAH	KAB. PARIGI MOUTONG	5
377	SULAWESI TENGAH	KAB. TOLI-TOLI	5
378	SULAWESI TENGGARA	KAB. BOMBANA	3
379	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON	3
380	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA	3
381	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA UTARA	3
382	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE	3
383	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE SELATAN	3
384	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE UTARA	3
385	SULAWESI TENGGARA	KAB. MUNA	3
386	SULAWESI TENGGARA	KAB. WAKATOBI	3
387	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU-BAU	3
388	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON UTARA	4
389	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	4
390	SULAWESI UTARA	KAB. BOLAANG MONGONDOW	5
391	SULAWESI UTARA	KAB. BOLAANG MONGONDOW UT	5
392	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	5
393	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN SITARO	5
394	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN TALAUD	5
395	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	5
396	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA SELATAN	5
397	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA TENGGARA	5
398	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA UTARA	5
399	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	5
400	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	5
401	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	5
402	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	5
403	SUMATRA BARAT	KAB. DHARMASRAYA	3
404	SUMATRA BARAT	KAB. PASAMAN	3
405	SUMATRA BARAT	KAB. LIMA PULUH KOTA	4
406	SUMATRA BARAT	KAB. PASAMAN BARAT	4
407	SUMATRA BARAT	KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	4

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
408	SUMATRA BARAT	KAB. TANAH DATAR	4
409	SUMATRA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	4
410	SUMATRA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	4
411	SUMATRA BARAT	KAB. AGAM	5
412	SUMATRA BARAT	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	5
413	SUMATRA BARAT	KAB. PADANG PARIAMAN	5
414	SUMATRA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	5
415	SUMATRA BARAT	KAB. SOLOK	5
416	SUMATRA BARAT	KAB. SOLOK SELATAN	5
417	SUMATRA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	5
418	SUMATRA BARAT	KOTA PADANG	5
419	SUMATRA BARAT	KOTA PADANGPANJANG	5
420	SUMATRA BARAT	KOTA PARIAMAN	5
421	SUMATRA BARAT	KOTA SOLOK	5
422	SUMATRA SELATAN	KAB. OGAN ILIR	2
423	SUMATRA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ILIR	2
424	SUMATRA SELATAN	KOTA PALEMBANG	2
425	SUMATRA SELATAN	KAB. BANYUASIN	3
426	SUMATRA SELATAN	KAB. LAHAT	3
427	SUMATRA SELATAN	KAB. MUARAENIM	3
428	SUMATRA SELATAN	KAB. MUSI BANYUASIN	3
429	SUMATRA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ULU	3
430	SUMATRA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ULU TI	3
431	SUMATRA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	3
432	SUMATRA SELATAN	KAB. EMPAT LAWANG	4
433	SUMATRA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	4
434	SUMATRA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ULU SE	4
435	SUMATRA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU	4
436	SUMATRA SELATAN	KOTA PAGARALAM	4
437	SUMATRA UTARA	KAB. ASAHAN	3
438	SUMATRA UTARA	KAB. BATUBARA	3
439	SUMATRA UTARA	KAB. DELI SERDANG	3
440	SUMATRA UTARA	KAB. LABUHAN BATU	3
441	SUMATRA UTARA	KAB. LANGKAT	3
442	SUMATRA UTARA	KAB. SERDANG BEDAGAI	3
443	SUMATRA UTARA	KOTA BINJAI	3
444	SUMATRA UTARA	KOTA MEDAN	3
445	SUMATRA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	3
446	SUMATRA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	3
447	SUMATRA UTARA	KAB. ANGKOLA SIPIROK	4
448	SUMATRA UTARA	KAB. DAIRI	4

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
449	SUMATRA UTARA	KAB. KARO	4
450	SUMATRA UTARA	KAB. MANDAILING NATAL	4
451	SUMATRA UTARA	KAB. PADANG LAWAS	4
452	SUMATRA UTARA	KAB. PAKPAK BHARAT	4
453	SUMATRA UTARA	KAB. SAMOSIR	4
454	SUMATRA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	4
455	SUMATRA UTARA	KAB. TAPANULI SELATAN	4
456	SUMATRA UTARA	KAB. TOBA SAMOSIR	4
457	SUMATRA UTARA	KOTA PADANG SIDEMPUAN	4
458	SUMATRA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	4
459	SUMATRA UTARA	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	5
460	SUMATRA UTARA	KAB. NIAS	5
461	SUMATRA UTARA	KAB. NIAS SELATAN	5
462	SUMATRA UTARA	KAB. TAPANULI TENGAH	5
463	SUMATRA UTARA	KAB. TAPANULI UTARA	5
464	SUMATRA UTARA	KOTA SIBOLGA	5

III. KETENTUAN RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Ketentuan Khusus berlaku untuk linis usaha kendaraan bermotor

- a. Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi atau tsunami.
- b. Perusahaan Asuransi Umum wajib menggunakan klausul KL-KBM-11 Klausul Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi, yang merupakan perluasan dari syarat dan ketentuan pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia sesuai edaran SK DPP AAUI no 06/AAUI/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Penetapan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia termasuk penyempurnaannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Regulator.

2. TARIF PREMI DAN ZONA ASURANSI GEMPA BUMI

- a. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi wajib memberlakukan tarif premi dan Zona Asuransi Gempa Bumi seperti tercantum pada Tabel IV.E.
- b. Perusahaan Asuransi Umum harus mencantumkan tarif premi Asuransi Gempa Bumi sebagaimana angka 1 diatas dalam Ikhtisar polis atau dokumen yang merupakan bagian dari polis yang wajib diketahui oleh tertanggung dan atau pembayar premi.

3. RISIKO SENDIRI

Perusahaan Asuransi Umum harus memberlakukan ketentuan risiko sendiri pada perluasan jaminan Asuransi Gempa Bumi sebesar 10% dari nilai ganti rugi yang disetujui, atau paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

4. KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan lainnya mengacu pada Ketentuan Tarif Asuransi Kendaraan Bermotor pada Lampiran 1 dari Surat Edaran ini.

-21-

TABEL IV.E
TARIF PREMI ASURANSI GEMPA BUMI
LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

No	Wilayah	Tarif Premi	
		<i>Comprehensive</i>	<i>Total Loss Only</i>
1.	Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauannya.	0,12% s/d 0,135%	0,085% s/d 0,11%
2.	Wilayah 2: Jakarta, Banten dan Jabar.	0,10% s/d 0,125%	0,075% s/d 0,10%
3.	Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2.	0,075% s/d 0,135%	0,05% s/d 0,75%